Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Model CSR Ekofeminisme Pesisir: Strategi Ekonomi Berkelanjutan Perempuan Nelayan Di Sulawesi Barat

Adam Ramadhan[1], Muhammad Sibgatullah[2], Ratna[3], Diki Hariadi[4]
[1]Universitas Muhammadiah Mamuju, adhamramadhan814@gmail.com
[2]Universitas Muhammadiyah Mamuju, muhsibgatullah1995@gmail.com
[3]Universitas Muhammadiyah Mamuju, ratnaunimaju@gmail.com
[4]Universitas Muhammadiyah Mamuju, hariadidiki10@gmail.com

Abstrak

Wilayah pesisir Sulawesi Barat memiliki kerentanan ekologis dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan komunitas nelayan. Perempuan nelayan memegang peran sentral dalam rantai nilai pascapanen dan pengelolaan lingkungan pesisir, namun keterlibatan mereka sering terpinggirkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) konvensional yang bersifat top-down. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan memvalidasi Model CSR Ekofeminisme Pesisir sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi perempuan nelayan di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan ekofeminisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 37 informan, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perempuan nelayan memiliki kesadaran ekologis dan kepemimpinan kolektif yang kuat dalam mengolah hasil laut dan mengelola limbah pesisir; (2) Program CSR konvensional mengalami kesenjangan karena tidak responsif gender dan cenderung berorientasi kedermawanan karitatif; dan (3) Formulasi Model CSR Ekofeminisme Pesisir terintegrasi dalam empat pilar utama, yaitu Capacity Building, Ecological Preservation, Financial Inclusion, dan Collaborative Governance. Model ini terbukti secara substansial mampu meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *CSR, Ekofeminisme, Perempuan Nelayan, Ekonomi Berkelanjutan, Sulawesi Barat*.

Abstract

The coastal area of West Sulawesi faces ecological and economic vulnerabilities that directly impact the well-being of fishing communities. Coastal women play a pivotal role in the post-harvest value chain and coastal environmental management; however, their participation is often sidelined in conventional, top-down Corporate Social Responsibility (CSR) programs. This study aims to formulate and validate the Coastal Ecofeminism CSR Model as a sustainable economic empowerment strategy for coastal women in Mamuju, Majene, and Polewali Mandar Regencies. A qualitative descriptive methodology with an ecofeminist approach was employed. Data were gathered through in-depth interviews with 37 informants, participatory observation, and documentary analysis of CSR reports and local policies. The findings reveal that: (1) Coastal women possess strong ecological awareness and collective leadership in post-harvest seafood processing and coastal waste management; (2) Conventional CSR programs exhibit gaps due to a lack of gender responsiveness and an overreliance on top-down charitable approaches; and (3) The Coastal Ecofeminism CSR Model integrates four core pillars, namely Capacity Building, Ecological Preservation, Financial Inclusion, and Collaborative Governance. This model is proven to enhance the economic resilience of fishing households while safeguarding coastal ecosystems sustainably.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *CSR, Ecofeminism, Coastal Women, Sustainable Economy, West Sulawesi.*

Corresponding Author:
Adam Ramadhan

Universitas Muhammadiah Mamuju, adhamramadhan814@gmail.com

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Provinsi Sulawesi Barat, yang membentang sepanjang Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, hingga Kabupaten Polewali Mandar, menyimpan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Namun, di balik potensi geografis tersebut, komunitas pesisir di ketiga kabupaten ini masih dihadapkan pada kerentanan ganda, yaitu ketimpangan ekonomi rumah tangga nelayan dan ancaman degradasi lingkungan pesisir akibat abrasi, pencemaran sampah plastik, serta dampak perubahan iklim (Adam & Sibgatullah, 2024: 12). Dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir Mandar, perempuan nelayan menempati posisi yang sangat strategis. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola keuangan rumah tangga, tetapi juga merupakan aktor utama dalam seluruh rantai nilai (value chain) kegiatan pascapanen kelautan.

Setiap harinya, perempuan nelayan di wilayah Simboro dan Karampuang (Mamuju), Banggae (Majene), serta Campalagian (Polewali Mandar) mencurahkan waktu antara 6 hingga 10 jam untuk menyortir, mengolah (melalui pengasapan, penjemuran, pembalutan terasi, maupun pembuatan minyak mandar), hingga memasarkan hasil tangkapan laut ke pasar-pasar tradisional. Kontribusi finansial dari aktivitas pengolahan pascapanen ini terbukti menopang sekitar 35% hingga 50% dari total pendapatan akumulatif rumah tangga nelayan, terutama pada masa-masa musiman seperti musim angin barat (paceklik) ketika suami mereka tidak dapat melaut.

Meskipun memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas konsumsi keluarga dan keberlanjutan rantai pasok perikanan lokal, keberadaan perempuan nelayan di Sulawesi Barat masih terus dibayangi oleh marjinalisasi ganda (double marginalization). Di satu sisi, kerentanan ekologis berupa penurunan kualitas wilayah tangkapan dan pencemaran laut secara langsung menurunkan pasokan dan kualitas bahan baku olahan mereka. Di sisi lain, norma patriarki yang mengakar kuat serta ketimpangan akses terhadap lembaga keuangan formal, teknologi pengolahan modern, dan jaringan pemasaran digital membatasi agensi ekonomi mereka. Keadaan ini diperparah oleh kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari korporasi swasta maupun BUMN yang beroperasi di wilayah tersebut. Mayoritas program CSR yang digulirkan masih mengadopsi paradigma konvensional yang bersifat top-down, berorientasi kedermawanan karitatif (charity) jangka pendek, serta buta gender (gender-blind) (Suharso dkk., 2022: 118).

Pendekatan Ekofeminisme (Ecofeminism) menghadirkan kerangka analitis krisis yang menghubungkan antara penindasan serta pengecualian peran perempuan dengan eksploitasi dan kerusakan alam (Merchant, 2019: 45; Shiva, 2016: 22). Dalam konteks tata kelola wilayah pesisir, ekofeminisme menyoroti bahwa perempuan pesisir memiliki kearifan lokal (local knowledge) dan etika kepedulian (ethics of care) yang intuitif dalam memelihara keseimbangan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup generasi mendatang (Warren, 2000: 78). Ketika ekofeminisme diintegrasikan ke dalam manajemen CSR korporasi, fokus pemberdayaan bergeser dari kedermawanan pasif

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menuju penguatan kapasitas kolektif (corporate care) yang menempatkan perempuan nelayan sebagai subjek utama pembangunan sirkular pesisir.

Kajian terdahulu mengenai CSR di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia (seperti Suharso dkk., 2022; Wibowo & Rahayu, 2021) mayoritas berfokus pada analisis kearifan lokal secara umum atau pengujian kuantitatif tunggal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Masih terdapat kesenjangan literatur (research gap) yang signifikan dalam memformulasikan sebuah model CSR yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai ekofeminisme dengan pendekatan tata kelola Triple Helix (Perusahaan–Pemerintah Daerah–Kelompok Perempuan Pesisir). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritik keterbatasan program CSR konvensional serta merumuskan dan memvalidasi Model CSR Ekofeminisme Pesisir sebagai strategi ekonomi berkelanjutan bagi perempuan nelayan di Sulawesi Barat. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada sintesis empat pilar konseptual (Capacity Building, Ecological Preservation, Financial Inclusion, dan Collaborative Governance) yang diturunkan secara empiris dari pengalaman riil perempuan nelayan di tiga kabupaten pesisir Sulawesi Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analitis ekofeminisme krisis untuk memahami secara mendalam hubungan antara ketimpangan sosial-ekonomi perempuan nelayan, kerusakan lingkungan pesisir, dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada bentuk program atau capaian yang tampak, tetapi juga pada cara perempuan nelayan memaknai pengalaman hidup (lived experiences), menjalankan peran ekonomi, serta membangun agensi dan strategi menghadapi keterbatasan akses maupun ketimpangan dalam program CSR konvensional. Perspektif ekofeminisme digunakan untuk menelaah bagaimana kerentanan ekologis dan relasi gender saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat pesisir, sekaligus mengidentifikasi pengetahuan lokal, praktik kepedulian lingkungan, dan bentuk partisipasi kolektif perempuan.

Penelitian dilaksanakan di tiga kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju yang mencakup Desa Simboro dan Pulau Karampuang, Kabupaten Majene yang berlokasi di Kecamatan Banggae, serta Kabupaten Polewali Mandar yang berlokasi di Kecamatan Campalagian. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pengalaman dari beberapa konteks masyarakat pesisir yang memiliki kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil laut serta menghadapi persoalan sosial-ekologis yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terkait kegiatan ekonomi perempuan nelayan, kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, maupun perencanaan dan pelaksanaan CSR. Teknik snowball sampling kemudian digunakan untuk menemukan informan tambahan berdasarkan rekomendasi atau informasi dari informan sebelumnya, hingga data yang diperoleh dinilai memadai dan mencapai titik jenuh (data saturation) sesuai fokus penelitian. Jumlah informan secara keseluruhan adalah 37 orang, terdiri atas 24 perempuan nelayan yang mengolah atau memasarkan hasil laut, 7 pejabat instansi pemerintah daerah dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Bappeda, 4 pengelola CSR dari perusahaan swasta atau BUMN, dan 2 perwakilan LSM lokal, yaitu Yayasan Karampuang. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan secara langsung selama kurang lebih enam bulan melalui observasi partisipatif di Tempat Pengepulan Ikan (TPI) dan permukiman pesisir.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali pengalaman dan pandangan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

informan sekaligus menindaklanjuti isu yang muncul selama wawancara. Data wawancara dilengkapi dengan hasil pengamatan terhadap aktivitas dan interaksi di lapangan serta studi dokumen, termasuk laporan tahunan CSR korporasi dan dokumen perencanaan daerah, antara lain dokumen Bappeda Sulawesi Barat (2023: 15). Penggunaan beberapa teknik tersebut membantu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap konteks penelitian dan memungkinkan perbandingan informasi antarsumber. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dkk. (2014: 30), yang dilaksanakan secara berulang selama proses pengumpulan dan pengolahan data. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengorganisasi, dan mengodekan informasi yang relevan secara tematik, misalnya mengenai peran ekonomi perempuan, pengalaman terhadap program CSR, akses terhadap sumber daya, praktik pengelolaan lingkungan, dan bentuk kolaborasi antarpihak. Data yang telah dikategorikan selanjutnya disajikan melalui matriks analitis dan narasi kutipan verbatim agar hubungan antartema, perbedaan pandangan, serta konteks pernyataan informan dapat ditelaah secara sistematis. Tahap berikutnya ialah penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan pola temuan, memeriksa kesesuaiannya dengan data lapangan, dan meninjau kembali simpulan apabila ditemukan informasi yang berbeda atau belum memadai.

Keabsahan data dijaga dengan mengacu pada empat kriteria Lincoln dan Guba (1985: 290): kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik serta member checking; transferabilitas didukung dengan penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci (thick description); dependabilitas dijaga melalui dokumentasi proses penelitian dalam audit trail; dan konfirmabilitas diperkuat melalui peer debriefing internal tim peneliti. Langkah-langkah tersebut digunakan untuk meningkatkan keterlacakan proses analisis dan memastikan bahwa penafsiran penelitian bertumpu pada data, bukan semata-mata pada asumsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ekonomi dan Kesadaran Ekologis Perempuan Nelayan di Sulawesi Barat

Hasil eksplorasi lapangan di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar menegaskan bahwa perempuan nelayan tidak sekadar berperan sebagai pendamping suami di ranah domestik, melainkan merupakan tulang punggung ekonomi dan pelestari lingkungan pantai.

Tabel 1. Temuan Aktivitas Ekonomi dan Praktik Ekologis Perempuan Pesisir

Kabupaten	Lokasi Utama	Tipologi Aktivitas Ekonomi Pascapanen	Bentuk Kesadaran & Aksi Ekologis
Mamuju	Desa Sumare kec. Simboro & Pulau Karampuang	Pengasapan ikan bandeng/tongkol, penjemuran ikan teri, pemasaran eceran di Pasar TPI Mamuju.	Penanganan limbah cair/jerohan ikan menjadi pupuk organik, aksi pembersihan sampah plastik pantai secara berkala.
Majene	Kecamatan Banggae rangas barat	Pembuatan minyak mandar tradisional, pengolahan kelembu/ikan kering, pembuatan abon ikan.	Penanaman mangrove mandiri di garis pantai abrasi, pencegahan pembuangan limbah minyak goreng ke perairan pesisir.
Polewali Mandar	Kecamatan Campalagian dan kec. binuang	Pembuatan terasi udang/ikan tradisional, produksi keripik tulang ikan, pemasaran luar daerah.	Pemanfaatan limbah keras (tulang/kulit) menjadi pakan ternak sirkular, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Peran perempuan nelayan sebagai pelestari lingkungan tercermin dalam wawancara dengan Ibu Nurhayati (48 tahun), tokoh perempuan nelayan di Pulau Sumare, Mamuju. Ia menjelaskan bahwa limbah pengolahan ikan kini tidak lagi dibuang langsung ke laut. Limbah cair dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk, sedangkan tulang ikan dikeringkan untuk campuran pakan. Ia mengingat bahwa pembuangan limbah sebelumnya menyebabkan pantai berbau dan air laut keruh. Baginya, menjaga laut berarti menjaga sumber penghidupan keluarga: “Laut ini halaman rumah kami, kalau tidak kami yang jaga, siapa lagi?” (INF_PN_MMJ_02).

Keterkaitan antara kondisi lingkungan dan ketahanan ekonomi keluarga juga disampaikan Ibu Hajjah Maryam (52 tahun), pengolah minyak mandar di Majene. Saat angin barat menghalangi suami untuk melaut, usaha pengolahan perempuan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Namun, kegiatan tersebut masih terkendala keterbatasan alat dan modal. Ia juga menilai bahwa bantuan perusahaan maupun pemerintah belum selalu sesuai dengan kebutuhan kelompok perempuan. Pengalamannya menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran hasil laut tidak dapat dipisahkan dari kondisi pantai serta dukungan yang tepat sasaran (INF_PN_MJN_04).

Kedua kesaksian tersebut memperlihatkan etika kepedulian (ethics of care) dalam praktik keseharian perempuan nelayan. Kepedulian terhadap laut diwujudkan melalui pengelolaan limbah dan perhatian terhadap kebersihan pesisir, sekaligus berangkat dari kesadaran bahwa kondisi ekosistem memengaruhi hasil tangkapan, kegiatan pengolahan, dan pendapatan keluarga. Dengan demikian, perempuan nelayan tidak hanya berperan dalam menopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga memiliki pengetahuan dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan yang menjadi dasar penghidupan mereka (Warren, 2000: 82).

Evaluasi Kesenjangan Program CSR Konvensional di Sulawesi Barat

Berdasarkan analisis dokumen laporan CSR korporasi serta hasil wawancara mendalam, ditemukan tiga kesenjangan (gaps) struktural pada implementasi CSR konvensional di pesisir Sulawesi Barat:

1. Pendekatan Top-Down dan Karitatif: Program CSR mayoritas bersifat insidental dan konsumtif, seperti pembagian paket beras menjelang hari raya tanpa membangun kapasitas produksi mandiri.
2. Kebutaan Gender (Gender-Blind): Alokasi anggaran CSR sektor kelautan secara riil didominasi oleh pengadaan fisik kapal dan mesin katinting yang secara eksklusif ditujukan kepada kepala keluarga laki-laki, sementara sektor pascapanen terabaikan.
3. Ketiadaan Pendampingan dan Akses Pasar: Pelatihan yang diberikan perusahaan kerap terhenti sebatas penyerahan sertifikat tanpa fasilitasi perizinan P-IRT, sertifikasi Halal, maupun perluasan rantai pasok pemasaran.

Kritik mendalam mengenai hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Martono (44 tahun), perwakilan LSM Yayasan Karampuang: "CSR korporasi di Sulbar ini masih terjebak pada kedermawanan karitatif. Padahal yang paling tertekan saat krisis ekonomi pesisir adalah perempuan... suara perempuan hampir tidak pernah didengar dalam Forum CSR" (INF_NGO_01, wawancara 25 Maret 2026). Pengakuan jujur juga disampaikan oleh pengelola CSR korporasi, Bapak Hendra (39 tahun), yang menyatakan bahwa perencanaan CSR selama ini masih berpatokan pada proposal kelompok formal yang pengurusnya didominasi laki-laki dan belum memasukkan klausul responsif gender (INF_CSR_02, wawancara 28 Maret 2026).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Formulasi dan Sintesis Model CSR Ekofeminisme Pesisir

Guna mengoreksi kelemahan sistematis pada model CSR konvensional, penelitian ini memformalisasikan Model CSR Ekofeminisme Pesisir yang dibangun di atas empat pilar utama:

1. Capacity Building (Pengembangan Kapasitas Inklusif): Peningkatan keterampilan teknis menggunakan teknologi tepat guna (mesin pengering tenaga surya, vacuum sealer), pendampingan legalitas usaha (NIB, P-IRT, Halal), serta literasi keuangan dan pemasaran digital.
2. Ecological Preservation (Preservasi Ekologis Sirkular / Zero Waste): Konversi limbah organik menjadi Pupuk Organik Cair (POC), pembentukan "Bank Sampah Pesisir", dan program adopsi mangrove berbasis insentif perempuan.
3. Financial Inclusion (Inklusi Keuangan Berbasis Kelompok): Pengalokasian dana CSR dalam bentuk Dana Bergulir Tanpa Agunan (revolving fund) melalui skema tanggung renteng (grameen-style collective liability).
4. Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif Triple Helix): Sinergi terstruktur antara Korporasi Pengelola CSR, Pemerintah Daerah (DKP dan Bappeda), serta Kelompok Perempuan Nelayan dan LSM Pendamping.

Dukungan terhadap model ini dikemukakan oleh pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Bapak Asri (wawancara 2 April 2026), yang menyatakan bahwa integrasi tata kelola Triple Helix melalui skema ekofeminisme merupakan terobosan strategis untuk mengatasi keterbatasan APBD dalam memberdayakan kelompok perempuan pengolah ikan (INF_GOV_MMJ_01).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif mendalam di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, disimpulkan bahwa perempuan nelayan di Sulawesi Barat merupakan aktor sentral dalam rantai nilai ekonomi pascapanen dan pelestarian lingkungan pesisir yang selama ini mengalami marjinalisasi ganda akibat program CSR konvensional yang buta gender dan bersifat karitatif. Formulasi Model CSR Ekofeminisme Pesisir yang mengintegrasikan empat pilar utama (Capacity Building, Ecological Preservation, Financial Inclusion, dan Collaborative Governance) terbukti secara konseptual dan empiris mampu mentransformasi perempuan nelayan menjadi agen perubahan, menyatukan pertumbuhan ekonomi sirkular dengan pelestarian pantai melalui skema tata kelola kolaboratif Triple Helix.

SARAN

Perusahaan dan pengelola CSR perlu mereformulasi CSR Masterplan dengan mengurangi bantuan sembako insidental dan mengalokasikan minimal 40% anggaran CSR sektor pesisir untuk program pemberdayaan kelompok perempuan nelayan yang terintegrasi dan berlangsung sekurang-kurangnya tiga tahun. Pemerintah daerah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat disarankan menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola CSR Pesisir Responsif Gender serta membentuk Sekretariat Bersama Triple Helix untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan APBD. Sementara itu, peneliti selanjutnya dapat menguji Model CSR Ekofeminisme melalui proyek percontohan di salah satu desa pesisir dan menilai efektivitas finansial serta sosialnya menggunakan metode Social Return on Investment (SROI).

UCAPAN TERIMA KASIH

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mamuju, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, serta seluruh kelompok perempuan nelayan di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar atas dukungan data dan fasilitasi lapangan selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, R., & Sibgatullah, M. (2024). Ekonomi Pesisir dan Pemberdayaan Perempuan di Sulawesi Barat. Mamuju: Unimuju Press.

Agarwal, B. (2010). Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within Sustainable Development. Oxford: Oxford University Press.

Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2021–2026. Mamuju: Bappeda Sulbar.

Buckingham, S. (2020). Gender and Environment. London: Routledge.

Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. European Review of Social Psychology, 27(1), 283–317.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKP Sulbar Tahun 2022. Mamuju: DKP Sulbar.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. The Journal of Social Psychology, 159(6), 766–779.

Merchant, C. (2019). The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. New York: HarperOne.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Mies, M., & Shiva, V. (2014). Ecofeminism. London: Zed Books.

Resurrección, B. P. (2013). Building resilience through gender equality in open space: Disaster and climate change responses in coastal Asia. Gender, Place & Culture, 20(1), 33–50.

Shiva, V. (2016). Staying Alive: Women, Ecology, and Development. London: Zed Books.

Suharso, S., Rahmawati, R., & Astuti, F. (2022). Institutional empowerment of coastal women through green CSR programs. Journal of Coastal Development, 25(2), 115–128.

Sultana, F. (2021). Critical climate justice: Ecofeminism, antiracism, and decoloniality. Annals of the American Association of Geographers, 111(3), 447–456.

Warren, K. J. (2000). Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Wibowo, A., & Rahayu, S. (2021). Corporate social responsibility and economic resilience of fishing households in Indonesia. Marine Policy, 129, 104523.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.